



RELAWAN POLITIK DALAM SIRKULASI ELITE POLITIK DI INDONESIA PASCA-ORDE BARU

¹Cleorisa Cheguevara Riswan, ²Rahardian Putra Setia Budi, ³Kamaruddin Salim

^{1,2}Program Studi Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta

³Program Studi Sosiologi Universitas Nasional Jakarta

Email: kamaruddinslm@gmail.com

Diterima : 03-03-2024

Direvisi : 12-03-2024

Dipublikasi : 10-04-2024

Abstract

The focus of this research is related to political volunteers in the circulation of post-Orba political elites. Political volunteers are individuals who have institutionalized themselves in interest groups who play as an active role in political activities, both independently and in an organized manner. The involvement of political volunteers in the circulation of power elites in Indonesia marked the change from New Order politics to the Reform Order. As Vilfredo Pareto said, the circulation of elites in power is the process of replacing political leadership in a country or government. The results of this research portray that political volunteers have developed into important actors in political contestation and are able to influence the course of Indonesian political dynamics. Those factors of involving political volunteers include social change, advances in information technology, and shifts in political culture. The strength of political volunteers as a shadow party actually has several important points, first, having a flexible and broad social network. Second, become an influencer who is able to determine and control young and independent people. Third, groups are free to determine political attitudes. Fourth, political volunteers become a balancing group for the power of the bureaucracy and political parties. Fifth, the volunteer group comes from a generation that is literate in information technology, which then becomes the basis of their power in politics.

Keywords: *Political Volunteers, Elite Circulation, Reformation, Youth.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen menerapkan demokrasi dalam kehidupan publik. Praktik demokrasi memberikan ruang seluas-luasnya bagi warga negara untuk terlibat dalam proses politik. Salah satu bentuk partisipasi politik nyata warga negara salah satunya melalui Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan lima tahun terus mengalami perubahan, salah satunya hadirnya kelompok relawan politik dalam kontestasi politik. Relawan politik merupakan individu yang melembagakan diri dalam kelompok kepentingan yang berperan aktif dalam aktivitas politik, baik secara mandiri maupun terorganisir.

Keterlibatan relawan politik dalam sirkulasi elite politik di Indonesia ditandai adanya perubahan politik dari Orde Baru (Orba) ke Orde Reformasi. Reformasi menjadi era baru dalam mengembalikan kebebasan demokrasi yang dikooptasi *monoloyalis* (satu kepatuhan) zaman Orba. Reformasi memberikan perubahan sistem politik yang memberikan kebebasan seluasnya dalam pembentukan partai-partai politik baru dan distribusi kekuasaan sesuai dengan fungsi kelembagaan, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Perubahan politik pada Tingkat kelembangaan negara secara langsung memberi ruang partisipatif seluasnya bagi aktor-aktor politik non negara (*civil society*) yakni relawan politik.

Partisipasi relawan politik berkembang pasca-Orba, bagi Gerri Bermara disebabkan karena adanya kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik (parpol). Parpol cenderung transaksional dan sulit untuk berinteraksi langsung dengan konstituennya, sehingga sulit menyapa pemilih secara langsung atau bahkan merebut hati pemilih. Kelompok relawan politik mengidentifikasi dirinya tidak menjadi bagian dari partai politik dan menyebut dirinya sebagai kelompok independen.

Relawan politik hadir dalam kontestasi disebabkan oleh lemahnya peran partai politik. Akumulasi dari kekecewaan publik terhadap kinerja partai politik yang akhirnya melahirkan gerakan relawan politik. Relawan politik dalam konteks ini tidak dapat dikategorikan sebagai partisipasi yang dimobilisasi, sebab partisipasi yang lahir adalah partisipatif sukarela (otonomi) baik melalui pembentukan tim sukses maupun kelompok kepentingan lainnya (Amalia Syauket, 2022).

Hadirnya relawan politik sebagai kelompok penyeimbang dalam proses sirkulasi elite kekuasaan sebagaimana yang digambarkan Vilfredo Pareto, sirkulasi elite merupakan proses pergantian suatu kepemimpinan politik dalam sebuah negara ataupun pemerintahan. Sirkulasi elite sebagai bentuk mobilisasi politik yang dinamis dan perlu dilakukan guna mewujudkan dinamisasi dalam kekuasaan politik yang mana elite yang sedang berkuasa perlu diganti elite yang baru. Perwujudan sirkulasi elite politik di Indonesia legal dan konstitusional melalui proses Pemilu maupun Pilkada. Maka, secara sosiologis sirkulasi elite sebagai respon atas realitas dari sifat elite begitu kompleks dan beragam karena pengaruh besar yang mereka miliki dibandingkan masyarakat lainnya (Salim & Efriza, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis dengan melakukan studi pustaka melalui jurnal, buku, publikasi lembaga terkait dan artikel berita yang kemudian dikaji dalam perspektif teori elite dan relawan politik. Bogdan dan Taylor mendefinisikan “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang dan fenomena yang terjadi dan yang diamati (Lexy, 2000). Pendekatan penelitian deskriptif digunakan memberikan penekanan pada pemahaman tentang Relawan Politik dalam Sirkulasi Elite Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru. Maka, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kenyataan yang sekarang ini tentang dinamika dan partisipasi relawan politik pasca-Orba.

PEMBAHASAN

Fenomena Menguatnya Relawan Politik Pasca-Orde Baru

Berakhirnya kekuasaan politik Orba sejak Mei tahun 1998, berdampak luas terhadap reformasi politik di Indonesia. Reformasi hadir sebagai harapan kolektif dari seluruh elemen bangsa, diantaranya mengubah sistem pemerintahan yang sentralistik dan membuka ruang seluasnya partisipasi publik. Perubahan budaya politik monoloyal yang dipraktikkan masa Orba menjadi budaya politik berbasis pada aspek afektif, kognitif dan evaluatif. Bagi Almond, ketiga aspek budaya politik digunakan berdasarkan kognitif publik yang berangkat dari kebijakan politik yang diskriminatif. Kesadaran akan diskriminasi tersebut kemudian mendorong adanya afektid atau penilaian buruk sistem politik yang berlaku zaman Orba. Kesadaran kognitif dan afektif kemudian mendorong lahirnya kelompok relawan politik sebagai respon atas jalannya pemerintahan baik dan demokratis dalam penyelenggaraan negara.

Merujuk tiga aspek budaya politik yang Almond di atas, dapat dipahami bahwa fenomena relawan politik merupakan suatu hal yang positif, artinya publik sekarang punya partisipasi politik yang meningkat. Namun demikian keberadaan relawan harus direspon dengan baik dan kehati-hatian agar tidak menimbulkan efek negatif dalam praktik politik yang sekedar mengandalkan kekuatan massa, namun menyampingkan kualitas demorkasi. Amalinda Savirani menegaskan, relawan politik dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok diantaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel: Perkembangan Relawan Politik Pasca-Orde Baru

Perkembangan Relawan Politik menurut Amalinda Savirani		
Relawan politik yang berasal dari mantan aktivis mahasiswa yang terlibat dalam pergolakan politik tahun 1990-an atau dikenal aktivis Gerakan pro-demokrasi untuk menggulingkan penguasa ORBA, dan	Relawan politik berasal dari aktivis mahasiswa maupun aktivis yang berangkat dari berbagai organisasi non-pemerintah (LSM/NGO), yang berkomitmen pada isu-isu terkait gerakan anti-korupsi, petani dan	Relawan politik berasal dari kelompok seniman dan orang-orang di sektor kreatif. Kelompok ini tidak memunyai agenda politik, namun, memunyai jejaring massa di semua lapisan masyarakat, karena dengan bermodalkan popularitas yang dimiliki oleh para artis dan seniman tersebut,

saat ini mengidentifikasi diri dan kelompoknya dalam realitas politik nasional hingga saat ini, diantaranya: kelompok Pro Demokrasi, Mantan Aktivistis 98 dan Pro Jokowi	kelompok masyarakat adat serta isu kemasyarakatan lainnya, seperti WALHI dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara	menjadi daya tarik dan mendapatkan dukungan dari pengikutnya. Contohnya Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri) dan Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia
--	--	---

Sumber: Data diolah peneliti dari berbagai sumber

Tiga perkembangan relawan politik di atas, menggambarkan aktivitas tersebut ditujukan untuk kepentingan bersama. Peran relawan politik dalam konstestasi politik Indonesia seolah telah menjadi pilar utama pelembagaan demokrasi. Relawan politik seakan bergerak tanpa koordinasi dan terstruktur serta dapat bergerak sendiri untuk mendukung calon presiden ataupun pimpinan kepala daerah pilihannya. Bagi, Bambang Arianto, relawan politik mampu membangun kelembagaan budaya partisipatif dalam momentum pesta demokrasi, aktivitas relawan politik itu dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial baru yang pelopori oleh kelas menengah. Gerakan sosial baru bersamaan dengan kehadiran politik media sosial sebagai budaya populer yang menitikberatkan pada penokohan atau popularitas. Budaya populer dalam lanskap sosial politik Indonesia merupakan arena pertentangan perwakilan dan pengakuan terhadap satu tokoh tertentu (Bambang Arianto, 2014).

Budaya politik zaman Orde Baru menurut Hermawan Sulistyو merupakan personifikasi kekuasaan Soeharto. Pada masa Orde Baru, setiap individu tidak dapat menyatakan dan mengekspresikan suara dan hak politik mereka. Karena pemilihan umum hanya dijadikan sebagai etalase ataupun formalitas, tidak adanya demokrasi yang dapat masuk melalui kekuasaan dengan kata lain bergabung dengan kubu cendana baik melalui Partai Golkar atau partai lain yang berkoalisi. Lebih lanjut, menurut Sulistyو, adanya reformasi menjadi peluang dalam membuka ruang bagi setiap orang untuk berpartisipasi lebih luas dalam politik. Dengan sederhana, masyarakat di perkampungan memiliki hak dan peluang politik untuk menjadi pejabat politik seperti Joko Widodo (Hasil Wawancara dengan Hermawan Sulistyو pada Selasa, 30 Januari 2024, Pukul 15.57 WIB).

Memahami apa yang digambarkan Sulistyو di atas, dapat dipahami menguatnya relawan politik pasca-Orba sebagai bentuk ekspresi aktivitas politik yang kongkret serta respon kolektif akibat sentralistik akut yang dipraktikkan sebelum hadirnya Reformasi tahun 1998. Reformasi memberikan ruang seluasnya kepada seluruh struktur politik untuk terlibat aktif dan menjadi aktor-aktor politik dalam pesta demokrasi yang dilakukan setiap lima tahun. Reformasi mendorong individu-individu mengekspresikan sikap politiknya secara aktif dalam aktivitas politik tingkat lokal maupun nasional, termasuk para relawan politik yang mengatasnamakan dirinya Pro Jokowi (Projo) yang mendukung pencalonan Joko Widodo sebagai presiden. Hal ini tentunya selaras dengan pandangan Hermawan Sulistyو.

Apabila reformasi tidak ada, hal tersebut hanya sebatas angan-angan. Ruang tersebut hanya digapai dengan leluasa dengan demikian relawan politik menjadi tidak satu tujuan. Karena, apabila menaruh dukungan terhadap Joko Widodo maka akan muncul kemudahan akses untuk masuk dalam wilayah kekuasaan. Walaupun peluang tersebut bisa saja terbuka karena tidak ada pernah pada sebelumnya, hal tersebutlah yang membuat konflik diantara relawan dan dapat merajalela (Hasil Wawancara dengan Hermawan Sulistyو pada Selasa, 30 Januari 2024, Pukul 15.57 WIB).

Keterlibatan relawan politik pasca-Orba, memberikan dinamisasi politik pada masa reformasi. Hal tersebut, terlihat pada keaktifan para relawan politik mengambil bagian dalam pencalonan Jokowi sebagai Presiden sejak 2014-2019 yang lalu. Keberadaan relawan politik tentunya berdampak positif mewujudkan demokrasi yang sehat dan terbuka bagi semua elemen bangsa, namun dampak negatifnya ialah relawan politik yang terlibat berkonflik pada saat kekuasaan telah diraih dan mereka meminta jatah politik kepada pemimpin yang diusungnya. Disamping itu, tampilnya relawan politik dalam kontestasi politik, secara langsung menjadi tantangan bagi partai politik untuk melakukan evaluasi internal, khususnya terkait pendidikan politik dan tahapan dalam rekrutmen para pemimpin bangsa.

Evaluasi terkait peranan partai politik menjadi penting, karena partai dalam aktivitas dan tindakannya mewakili kepentingan warga serta memberikan jalan kompromi bagi pendapat dan tuntutan yang saling bersaing, serta menyediakan sarana kompromi bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan substansial. Kepemimpinan politik akan berujung pada kepemimpinan negara, maka pemimpin politik yang diusung oleh partai politik maupun relawan politik tidak terkooptasi oleh kepentingan individu atau golongan, sehingga kepemimpinan negara dapat berjalan maksimal demi kemajuan bangsa dan negara (Kamaruddin Salim&Efriza, 2023). Harapan publik terhadap partai politik pasca-Orba, menjadi klimak dari frustrasi politik yang dirasakan akan batasan hak politik dan kesempatan mengakses kepemimpinan politik. Karena, kompromi politik antara partai dan kelompok non partai baru terwujud sejak Orba lengser, hal ini ditegaskan oleh Sulistyو:

Adanya ruang kesempatan dalam partisipasi politik dalam bentuk gerbong dengan kekuasaan yang baru, namun ruang partisipasi politik tersebut tidak dapat dijamin. Pemimpin-pemimpin yang bermunculan pasca-Orba tidak dapat mungkin untuk membangun kekuatan politik dari relawan baru. Dengan demikian, pemanfaatan partai melalui kekuatan partai sangat kuat apabila dibandingkan dengan sebelumnya yang mana memiliki peluang lebih besar. Seperti pada PDI-P ketika era Soeharto, partai mengalami tekanan namun tidak bertahan lama. Seiringnya perjalanan setelah orde baru, PDI-P tumbuh menjadi partai yang besar dan kuat pada pemilu. Konsep relawan yang berkembang dan tumbuh pada masa era orde baru, belum adanya kestabilan internal dalam partai politik dengan pemimpin yang difaktori oleh keterbatasan sumber daya (Hasil Wawancara dengan Hermawan Sulistyو pada Selasa, 30 Januari 2024, Pukul 15.57 WIB).

Dinamika Politik Relawan dalam Sirkulasi Elite Politik Era Reformasi

Peranan relawan politik sebagai roda dalam kepentingan elite serta partai politik mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan dan sasaran kepentingan tersebut. Pergerakan daripada relawan politik ini tentunya dapat memberikan refleksi dalam kontribusi terhadap model pemerintahan yang bersifat demokrasi ekstra-parlementer (Amalia Syauket, 2022). Relawan politik sebagai aktor non-partai dan juga non-struktur politik pemerintahan, pada praktiknya mempunyai pengaruh yang signifikan dalam proses sirkulasi elite di Indonesia.

Dinamika sirkulasi elite di Indonesia secara legal terjadi per-lima tahun sekali. Walaupun sirkulasi elite tersebut belum memenuhi ekspektasi publik, akan hadirnya elite baru yang tidak terkooptasi dengan elite lama yang pernah memerintah. Bagi Pareto, dalam masyarakat ada gerakan yang tidak dapat di tahan dari individu-individu maupun elite-elite kelas atas dan kelas bawah, dan dari tingkat bawah ke tingkat atas yang melahirkan peningkatan luar biasa dengan meruntuhkan kelas yang memegang kekuasaan, ini yang disebut sirkulasi elite. Bagi Pareto, sirkulasi elite menunjukkan bahwa elite baru sebenarnya lapisan bawah dan golongan non elite ini mempunyai peran besar dalam melahirkan golongan baru. Bagi Pareto, antara *governing elite* dan *non-governing elite* senantiasa berkompetisi untuk mendapatkan kesempatan berkuasa, sehingga terjadinya sirkulasi antar elite (Kamaruddin Salim&Efriza, 2023).

Perubahan kekuasaan elite politik yang terjadi pasca-Orba memberikan dinamisasi politik yang demokratis, di mana semua elemen politik dalam negara mempunyai kesempatan yang sama mengakses kekuasaan, termasuk kelompok relawan politik. Namun, tantangannya ialah perputaran yang terjadi antar elite yang berkuasa dan elite yang belum berkuasa masing-masing saling menonjolkan kekuatan, keterampilan fisik, keberanian, keterampilan intelektual, charisma, kemampuan ekonomi dan agama untuk tampil menjadi penguasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disusun sendiri oleh elite maupun relawan politik. Hadirnya relawan politik sejatinya memperkuat nilai demokrasi di Indonesia, hal ini ditegaskan juga oleh Sulistyoyo.

Pada konteks relawan di Indonesia, tahapan tersebut belum dapat tercapai di Indonesia. Hal tersebut belum tercapai karena kondisi partai politik setelah era orde baru mengamalai instabilitas dalam partai politik, sehingga fenomena relawan menjadi anggota partai politik belum tumbuh secara signifikan. Apabila berbentuk sistem maka tidak ada, karena hanyalah bersifat sukarela. Namun, fenomena keterlibatan relawan dalam dunia politik bersifat global. Perbedaan mendasar pada relawan adalah pada negara-negara demokrasi yang sudah matang dalam ruang lingkup politik melalui partai politik yang mana relawan politik tersebut bergabung dengan partai yang ada. Hal ini dapat dilihat pada negara Amerika Serikat, individu yang merasa cocok dengan berlandaskan pada nilai-nilai dan norma dengan partai demokrat, maka individu tersebut akan bergabung secara formal meskipun sebelumnya sebatas relawan (Hasil Wawancara dengan Hermawan Sulistyoyo pada Selasa, 30 Januari 2024, Pukul 15.57 WIB).

Politik relawan yang digambarkan Sulistyoyo di atas, menunjukkan perkembangan signifikan dalam politik nasional, yang semua menjadi kelompok partisan partai kemudian melembagakan diri menjadi lembaga non-partai. Pelembagaan relawan politik, sejatinya diakibatkan dinamisasi politik yang cair dan terjadinya sirkulasi elite yang terjadi sejak 1999-

2019 yang lalu. Variabel ini kemudian mendorong lahirnya partai-partai politik baru serta bermunculan kelompok-kelompok relawan politik mengekspresikan kepentingan politiknya secara terbuka dan langsung dalam proses pemilu.

Kelembagaan relawan politik sebagai organisasi tentunya memainkan peran sentral dalam kontetasi politik, baik Pemilu maupun Pilkada. Gerakan reformasi adalah kunci bagi relawan politik mendorong perubahan sistem politik di Indonesia. Gerakan reformasi membuka kesempatan publik mengakses kekuasaan tanpa melalui partai politik. Menurut Ferdian Ardian, eksistensi relawan politik saat ini bermetamorfosis menjadi partai bayangan menjadi tantangan dalam penyelenggara pemilu dan maupun tampil menjadi peserta pemilu. Sehingga menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu saat ini adalah melakukan pengaturan terhadap relawan politik, hal ini bertujuan untuk wujud pengelolaan partisipasi publik yang lebih baik. (Ardian, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/31/pemilu-relawan-politik-dan-partai-bayangan>). Berbeda dengan Ardian, Hermawan Sulistyو menegaskan;

Relawan-relawan tersebut memiliki keterputusan dan kesinambungan dengan periode sebelumnya. Dalam hal keterputusan, relawan-relawan pada umumnya dari generasi muda yang tidak melewati era orde baru, hal tersebut dapat dilihat secara empirik bahwa tindakan politik yang represif sehingga para generasi muda tidak mengetahui mengenai Prabowo Subianto. Sehingga, yang diketahui oleh khalayak umum adalah dilihat melalui materi dan Gibran Rakabuming Raka sebagai representasi dari generasi muda. Pada hal berkesinambungan, generasi tua (*baby boomer generation*) dapat melihat peluang dan kondisi dengan cara berpikir bahwa tidak adanya tindakan represif maka dapat menentukan hak politik mereka (Hasil Wawancara dengan Hermawan Sulistyو pada Selasa, 30 Januari 2024, Pukul 15.57 WIB).

Perubahan politik yang cepat dan dinamis seiring dengan sirkulasi elite sejak era reformasi menjadi ruang bagi aktor-aktor politik yang berkompetisi beragam dan berganti posisi dalam kekuasaan politik. Menurut Sulistyو, tampilnya generasi milenial dan gen-Z memberikan efek elektoral yang besar, salah satunya majunya Gibran sebagai calon wakil presiden, walaupun menimbulkan beragam perdebatan. Tampinya generasi muda sebagai relawan dalam pentas perpolitikan Indonesia sangat penting bagi upaya mencari jalan sebagai upaya memahami eksistensi politik kaum muda. Kini wacana pemimpin muda menguat kembali dalam politik Indonesia, walaupun eksistensi politik kaum muda menjadi relawan politik sekaligus sebagai *influencer* bergabung ke dalam kemenangan ketiga pasangan calon presiden pada pemilihan umum tahun 2024.

Keterlibatan relawan politik dalam proses proses politik dapat meningkatkan eksistensi mereka, kemudian bermetamorfosis menjadi partai bayangan memberi tantangan bagi penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Relawan politik memiliki irisan dengan partai politik dan kandidat dalam pemilu. Keberadaan relawan politik menjadi tantangan bagi eksistensi parpol seperti dalam soal ideologisasi, kaderisasi, dan edukasi politik bagi warga. Kehadiran relawan politik sejatinya sama persis dengan apa yang dilakukan parpol. Eksistensi relawan politik dapat mereduksi fungsi dan eksistensi parpol. Parpol sudah saatnya mampu melakukan perubahan mendasar dalam tata kelola untuk menjawab tantangan di depan mata. Proses ideologisasi, kaderisasi, demokratisasi, dan pendidikan politik semestinya semakin kukuh dilakukan oleh parpol. Karena saat ini, keberadaan relawan politik menjadi tulang

pungggung kandidat. Wujudnya berupa tim yang terstruktur (di luar struktur partai) yang dibentuk mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, desa, hingga tempat pemungutan suara (TPS) (Feridan Andi, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/31/pemilu-relawan-politik-dan-partai-bayangan>) diakses pada 3 februari 2024).

KESIMPULAN

Keterlibatan relawan politik dalam proses sirkulasi elite mampu memengaruhi monopoli elite partai maupun elite politik dalam pemilu. Kehadiran relawan politik sejatinya sama persis dengan apa yang dilakukan parpol. Eksistensi relawan politik dapat mereduksi fungsi dan eksistensi parpol. Parpol sudah saatnya mampu melakukan perubahan mendasar dalam tata kelola yang mampu mengakomodir generasi muda. Fenomena generasi muda sebagai relawan politik tentunya mengokohkan posisi kaum muda setara dengan kaum tua dalam arena politik. Kekuatan relawan politik sebagai partai bayang sebenarnya mempunyai beberapa poin penting, *pertama*, mempunyai jaringan sosial yang luwes dan luas. *Kedua*, menjadi *influencer* yang mampu menjadi penentu dan pengendali kaum muda dan independen. *Ketiga*, kelompok yang bebas dalam menentukan sikap politik. *Keempat*, relawan politik menjadi kelompok penyeimbang bagi kekuatan birokrasi dan partai politik. *Kelima*, kelompok volentir berangkat dari generasi yang melek teknologi informasi, kemudian menjadi basis kekuatan mereka dalam politik.

Relawan politik merupakan kelompok non-partai sudah saatnya harus mampu mengorganisasi dan melembagakan dirinya secara modern. Harus mempunyai ideologi politik dan konsep pengembangan diri dan kelembagaan yang jelas. Sehingga mampu menjadi kelompok penyeimbang dalam kontestasi politik dan bisa tampil sebagai calon pemimpin yang independan dan terbebas dari intervensi partai politik maupun penguasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, M. M. *Elite Dan Sikap Politik: Studi Atas Pengaruh Elite Partai Gerindra Pasca Pilpres 2019* (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Athoriq, H. 2024. *Strategi Komunikasi Spin Doctor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Menjelang Pemilihan Umum 2024 di Provinsi Jawa Tengah*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
- Islami, N. M. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Langsung Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019–2024 Di Kabupaten Rokan Hilir (studi Kasus Di Kecamatan Rimba Melintang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Lexy, M. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Salim, Kamaruddin & Efriza. (2019). *Sosiologi Politik, Sejarah, Analisis dan Dinamika Perkembangan Konsep*. Malang: Intrans Publishing.
-(2023). *Sosiologi Kekuasaan, Teori dan Perkembangan*. Jakarta. Bumi Aksara

Jurnal Ilmiah

- Arianto, Bambang. (2014). *Fenomena Relawan Politik dalam Kontestasi Presidensial 2014*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 18, Nomor 2.
- Haidari, A. (2017). *Padigma Kebijakan Politik Kerukunan Antaraagama Di Indonesia Pada Masa Orde Baru dan Masa Reformasi*. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 9 (1), 25-63.
- Natashya, N., Laurencia, C., & Rasji, R. (2023). *Perspektif Hukum Tata Negara terhadap Pemikiran Jabatan Presiden Tiga Periode Ditakutkan Menjadi Penyalahgunaan Wewenang*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 2832-2845.
- Permana, P.A. 2022). *Kontradiksi Struktural dalam Politik Lokal Indonesia Pasca Orde Baru*. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*.
- Syauket, Amalia. 2022. *Peran Relawan Politik Dalam Konstelasi Politik Indonesia*. *Jurnal Hukum Sasana*. Volume 8, Nomor 1.

Internet dan Dokumen lain

- Andi, Ferdian. *Pemilu, Relawan Politik, dan Partai Bayangan*, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/31/pemilu-relawan-politik-dan-partai-bayangan>, diakses pada 3 february 2024.
- Hasil Wawancara dengan Hermawan Sulistyio, pada Selasa, 30 Januari 2024, Pukul 15.57 WIB.